

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN
RELOKASI PENDUDUK BANTARAN
SUNGAI KARANGMUMUS SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR**
**(Studi Kasus : Kebijakan Relokasi Penduduk Bantaran Sungai
Karangmumus)**

Ayu Dewi Mayasari¹, Aji Ratna Kusuma², Syahrani³

Abstract

The purpose of this study was to determine the perceptions of public policy of the inhabitants of the basin Karangmumus in the city of Samarinda. This is a qualitative research method. Background of the relocation is that the local government considers that environmental Samarinda city in Samarinda Karangmumus basin dirty, crowded, flood and muddy. Relocation is a form of public policy of the government concerned. Researchers will evaluate the relevant policies related to the implementation itself on political will, goodwill, commitment, accountability, reliability, participation, transparency, legality, justice, and so on. Theories are taken on the evaluation, public policy, development, environment, residents, legality and relocation. The conclusion of this report is that the relocation policy is successful and can be a model of regulation of other cities. Suggestions of researchers is to encourage local governments to continue relocation Samarinda with excellent procedure.

Keywords: Public Perception, Policy, Population Relocation

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi kebijakan publik dari penghuni wilayah sungai Karangmumus di kota Samarinda. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Latar belakang dari relokasi adalah bahwa pemerintah daerah Samarinda menilai bahwa lingkungan kota wilayah sungai Karangmumus di Samarinda kotor, penuh sesak, banjir dan berlumpur. Relokasi adalah bentuk kebijakan publik dari pemerintah yang bersangkutan. Peneliti akan mengevaluasi kebijakan yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan itu sendiri mengenai kemauan politik, kemauan baik, komitmen, akuntabilitas, kehandalan, partisipasi, transparansi, legalitas, keadilan, dan sebagainya. Teori-teori yang diambil pada evaluasi, kebijakan publik, pembangunan, lingkungan, warga, legalitas dan relokasi. Kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa kebijakan

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

relokasi adalah sukses dan dapat menjadi model pengaturan dari kota-kota lain. Saran dari peneliti adalah untuk mendorong pemerintah daerah Samarinda untuk melanjutkan relokasi dengan prosedur yang sangat baik.

Kata Kunci : *Persepsi Masyarakat, Kebijakan, Relokasi Penduduk*

Pendahuluan

Mengelola sebuah wilayah memerlukan suatu kerangka pikir yang komprehensif artinya bahwa dalam mengelola wilayah meliputi pengelolaan lingkungan alam, sosial dan budaya. Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang yang disebut pembangunan nasional yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan seluruh masyarakat. Baik secara individu maupun secara formal melalui berbagai jenis organisasi yang terdapat di dalam masyarakat. Pembangunan pada dasarnya untuk melanjutkan kehidupan dan penghidupan bangsa yang sejahtera. Untuk menyukseskan pembangunan nasional semua pihak harus bersinergi yang berperan besar sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab. Pembangunan yang demikian disebut *sustainable development* atau pembangunan yang berkelanjutan yang mengidentifikasi bahwa suatu pembangunan dapat berkembang apabila ekonomi rakyat berkembang. Dengan basis ekonomi yang kuat yang dipunyai daerah sehingga tidak akan terguncang oleh faktor dari luar dan faktor dari dalam yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

Pemerintah kota Samarinda sebagai salah satu pemerintah kota di Provinsi Kalimantan Timur terus membangun di segala bidang .Sebagai Ibu Kota Provinsi dan kota jasa maka kota ini penduduknya terus bertambah secara signifikan dan saat ini jumlah penduduk hampir satu juta jiwa dengan pertambahan penduduk 3% setahun dimana didominasi penduduk pendatang dari pulau lain. Pembangunan di segala bidang tersebut meliputi infrastruktur seperti jalan, gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan dan industri serta pergudangan bukan hanya akan menjadi faktor penarik (*pull factor*) dan faktor pendorong (*push factor*) pertumbuhan populasi namun sekaligus meningkatkan ruang pemukiman termasuk di daerah aliran sungai (DAS). Pertumbuhan jumlah penduduk yang bermukim di sepanjang bantaran sungai yang semakin banyak mengakibatkan perkembangan pemukiman yang padat dan berkembang secara sporadis menyebabkan terjadinya penyempitan badan sungai. Hal ini dialami di daerah aliran Sungai Karangmumus yang mengalir ke Sungai Mahakam. Akibatnya wilayah sungai ini dihadapkan dengan degradasi lingkungan berupa pemukiman kumuh. Kebetulan sungai Karangmumus berada ditengah kota Samarinda sehingga membuat kota ini menjadi kumuh juga . Oleh karena pemukiman bantaran sungai Karangmumus yang demikian kumuh maka Pemerintah Kota Samarinda mengambil suatu kebijakan yaitu membuat suatu program pemindahan warga yang tinggal di tepi sungai Karangmumus ke Bengkuring dan Sambutan. Program relokasi ini disebut relokasi penduduk dari daerah aliran sungai (DAS) Karangmumus melalui Peraturan Daerah Kotamadya Samarinda Nomor 3 tahun 1986. Pemindahan penduduk tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan lingkungan sungai.

Menurut Agus dan Nana (2007 : 11), langkah-langkah penataan Sungai Karangmumus yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Samarinda, yaitu:

- a) Kawasan pemukiman kumuh yang berada di bantaran Sungai Karangmumus pada radius kurang lebih 5 - 20 meter akan direlokasi keluar kawasan.
- b) Memindahkan atau menutup industri - industri kecil di sepanjang Sungai Karangmumus.
- c) Memperlebar jalan di tepi sungai yang ada di tepi sungai Karangmumus
- d) Menata relokasi pasar Segiri, Pasar Pagi dan pasar kecil lainnya.
- e) Membuat jalur hijau dan taman di lahan sepanjang sungai yang terkena relokasi.

Berbagai faktor yang mempengaruhi lambatnya penataan bantaran Sungai Karangmumus sebagai ruang terbuka hijau (RTH) adalah sulitnya upaya pelaksanaan relokasi karena sebagian warga bantaran Sungai Karangmumus ke Bengkuring dan Sambutan tidak mau pindah.

Kondisi tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi sungai itu sendiri dalam rangka mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Dengan alasan tersebut adalah kebijakan relokasi pemukiman di sekitar bantaran Sungai Karangmumus. Selain itu Sungai Karangmumus yang merupakan anak sungai dan Sungai Mahakam yang menjadi salah satu program kali bersih nasional di Kalimantan Timur.

Dari beberapa fenomena tersebut di atas, saat ini masih banyak terdapat masyarakat yang berdomisili di bantaran Sungai Karangmumus. Dengan berbagai alasan yang mengemuka diantaranya lokasi pengganti yang jauh dan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti listrik dan air serta biaya pengganti yang tidak sesuai dengan harga yang diharapkan. Meskipun demikian sudah ada pula yang telah pindah dari bantaran Sungai Karangmumus tersebut dengan berbagai alasan pula.

Kerangka Dasar Teori

Persepsi masyarakat

1. Pengertian dan Pemahaman Persepsi Masyarakat

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya : persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono dan Gulo, 1987:343).

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff dalam Walgito, 2000:53).

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang *integrated*,

maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2000:54). Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah : stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut *society* asal katanya *socius* yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Soelaiman, dalam Musadun, 2000:86)

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan dalam tatanan sosial masyarakat. Lebih lanjut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ralph Linton dalam Harsojo (1997:144) menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Dari defenisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup secara bersama-sama dan saling berhubungan. Artinya bahwa setiap individu manusia yang satu sadar akan adanya individu yang lain dan memperhatikan kehadiran individu tersebut. Bila dikombinasikan antara persepsi dan masyarakat maka penulis memberikan defenisi bahwa persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu

yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Robbins (2001 : 89) mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu:

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

Kebijakan Publik

Batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*publik policy*) beragam tergantung latar belakang yang berbeda-beda . Sementara di sisi lain pendekatan dan model yang digunakan juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2002:15).Kegiatan pembuatan kebijakan publik harus mencakup beberapa hal seperti dikemukakan oleh Rasyid, *et al.* (2002 :239) yaitu :

- a) Kegiatan membuat kebijakan yang bersifat distributif;
- b) Kebijakan mengatur kompetisi;
- c) Kebijakan yang mengatur perlindungan;
- d) Kebijakan yang menyangkut redistribusi kekayaan masyarakat;
- e) Kebijakan yang bersifat ekstratif;
- f) kebijakan strategis;
- g) Kebijaksanaan karena krisis;

Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi atau tindakan tertentu pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Dalam memahami kebijakan publik berikut ini diberikan beberapa teori :

1. Mustopadidjaja, (1992).mengemukakan: “Pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan Pembangunan.”
2. Frewitt, (dalam Thoha, 1990:251) pendapatnya senada telah dikemukakan oleh Mustopadidjaja,: “Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Sedangkan kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan

oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal “.

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti:

- a) Hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama;
- b) Adanya formalisasi;
- c) Pelaksananya adalah orang-orang dalam organisasi;
- d) Adanya perilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan dan pelaksana.

Kebijakan atau *policy* penggunaannya sering disama-artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar (Wahab, 1991:1-2). Sedangkan pengertian *Policy* menurut perserikatan bangsa-bangsa adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum maupun khusus, berdasarkan cakupan yang luas maupun sempit, transparan maupun kabur (tidak jelas), terperinci maupun global, kualitatif dan bersifat publik maupun privat. Dengan demikian, pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Anderson, 1979:99-102).

Pemukiman Masyarakat

Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. Pemukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *human settlement* yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungannya. Perumahan menitik beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu *houses* dan *land settlement*. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukiman atau kumpulan pemukim beserta sikap dan prilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human). Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya yang pada hakikatnya saling melengkapi.

Masalah perumahan dan pemukiman, baik di perkotaan maupun di pedesaan merupakan masalah yang sangat kompleks. Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki (dana, lahan pemukiman dan lain-lain). Menurut Kuswartojo (2005 115), perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta sarana dan prasarana lingkungannya. Perumahan menitik beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu *houses* dan *land settlement*. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan

pemukiman beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human).

Berkembangnya suatu kota secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya. Pengembangan pembangunan perumahan dan pemukiman harus diupayakan sebagai satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang mampu menjamin pelestarian kemampuan fungsi lingkungan hidup perumahan dan pemukiman tersebut. Menurut Turner dalam Budihardjo (1999: 42), pembangunan pemukiman harus mengacu pada pedoman yang diberi nama Habitat Bill Of Right (hak asasi pemukiman) yang meliputi aspek lingkungan sebagai berikut:

- a) Fisik lingkungan yang mencerminkan pola kehidupan dan kebudayaan masyarakat setempat.
- b) Lingkungan pemukiman yang didukung oleh fasilitas dan utilitas umum yang sebanding dengan penduduk pendukungnya.
- c) Wadah kegiatan untuk menambah penghasilan bagi lingkungan pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah.
- d) Tersedianya taman, ruang terbuka ataupun penghijauan.
- e) Perencanaan tata letak berkarakteristik alami. Jalan lingkungan yang manusiawi dengan pemisahan antara jalur kendaraan dan pejalan kaki.
- f) Lingkungan pemukiman yang menunjang terjadinya kontak sosial antar warganya.

Lebih lanjut Snyder dalam Hadi (1987: 116) mengungkapkan, pengertian pemukiman adalah pemukiman sebagai suatu lingkungan binaan dalam hal ini adalah pemukiman merupakan proses pewadahan fungsional yang dilandasi oleh pola aktifitas manusia seperti pengaruh *Setting* (rona lingkungan) baik yang bersifat fisik dan non fisik (sosial budaya) yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewadahnya. Dimana lingkungan pemukiman terbentuk secara organik (proses informal) atau secara terencana (proses formal). Pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat selain harus mencerminkan perwujudan manusia seutuhnya dan peningkatan kualitas manusia meniadakan kecemburuan sosial dan secara positif menciptakan pemukiman dan perumahan yang mencerminkan kesetiakawanan serta keakraban sosial disamping itu juga harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kemampuan masyarakat serta berwawasan lingkungan.

Fungsi Bantaran Sungai

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung, sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai. Daerah sempadan mencakup daerah bantaran sungai yaitu bagian dan badan sungai yang hanya tergenang air pada musim hujan dan daerah sempadan yang berada diluar bantaran yaitu daerah yang menampung luapan air sungai di musim hujan dan memiliki kelembaban tanah yang tinggi dibandingkan kelembaban tanah pada

ekosistem daratan. Banjir di sempadan sungai pada musim hujan adalah peristiwa alamiah yang mempunyai fungsi ekologis penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kesuburan tanah.

Menyadari pentingnya fungsi sempadan sungai bagi perlindungan ekosistem sungai dan daratan, dimana peningkatan penggunaan lahan terus bertambah sepanjang tahun. Pengalihan pemanfaatan lahan sepanjang sungai menimbulkan risiko bagi penghuni bantaran sungai (seperti penggenangan air secara periodik dan longsor), ditambah lagi dengan perkembangan perumahan dan pemukiman akan semakin meningkatkan beban pencemaran sungai itu sendiri. Pengelolaan daerah sempadan sungai menurut Mulyanto (2007: 97) juga ditujukan untuk :

- a) Pengendalian aliran permukaan tanah (*excess*) yang merusak, sebagai usaha mengendalikan banjir.
- b) Memperlancar infiltrasi air kedalam tanah.
- c) Mengusahakan pemanfaatan aliran permukaan untuk tujuan yang berguna, dan
- d) Mengusahakan semua sumber daya tanah dan air untuk memaksimumkan produksi.

Seiring dengan keinginan manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, perkembangan kegiatan pemanfaatan kawasan bantaran sungai sudah barang tentu akan sulit dihentikan sama sekali. Sekalipun demikian degradasi kualitas lingkungan harus diminimalkan. Alam sendiri telah memiliki mekanisme pemeliharaan air yang efisien, murah dan perawatan yang mudah dalam bentuk daerah bantaran sungai yang bervegetasi. Dengan memelihara vegetasi bantaran sungai akan membantu tingkat penyerapan air yang tinggi untuk mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan (*sustainable*).

Kondisi Faktualnya

Sungai mengalir dan hulu ke hilir melalui wilayah dengan karakteristik fisik dan administrasi yang berbeda-beda. Dengan permasalahan persungaian yang bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh sifat alami sungai, fungsi Sungai serta perlakuan manusia dalam usaha memanfaatkan sungai berikut sumber daya yang dimilikinya yang secara alami bentuk atau morfologi sungai akan berubah dengan kurun waktu yang berbeda antara sungai satu dengan lainnya. Dimana penanganan sungai menuntut penangan satu sungai, satu perencanaan dan satu pengelolaan. Penanganan secara terpadu umumnya ditujukan untuk mengantisipasi fenomena umum melimpahnya air pada musim hujan serta sedikitnya air pada musim kemarau, ditambah lagi dengan persepsi masyarakat tentang bantaran sungai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis akan semakin meningkatkan beban sungai itu sendiri.

Dampak kumulatif dan pengalihan vegetasi bantaran sungai juga akan meningkatkan kecepatan aliran air hujan yang akan menyebabkan banjir dihilir baik durasi, frekuensi maupun kekuatannya. Menurut Legono dan Rahardjo (2000 : 76), proses degradasi sungai merupakan proses yang panjang yang lajunya tidak saja dipengaruhi oleh fenomena stokastik seperti hujan, banjir, longsor, letusan gunung berapi namun juga campur tangan manusia. Dengan tingkat pertumbuhan kawasan disekitar sungai, terutama di perkotaan yang semakin pesat menimbulkan

berbagai macam persoalan di sekitarnya. Persoalan tersebut antara lain berupa genangan akibat banjir, erosi tebing sungai, degradasi dasar sungai, pencemaran sungai, sedimentasi sungai di kawasan hulu yang mengganggu kinerja infrastruktur bangunan sungai sampai sedimentasi di muara sungai. Lebih lanjut Kamurur mengungkapkan, kondisi faktual mengenai masalah bantaran sungai yang terjadi di seluruh Indonesia pada saat ini antara lain :

- a) Pemukiman penduduk yang semakin meluas ke arah sungai yang mengakibatkan penyempitan alur sungai.
- b) Pemanfaatan sungai sebagai wadah pembuangan limbah rumah tangga, industri maupun sektor lainnya sehingga semakin meningkatkan pencemaran air sungai tersebut.
- c) Sedimentasi akibat adanya kegiatan di hulu sungai tersebut.

Dengan kondisi faktual sungai yang terjadi saat ini, tindak lanjut penanganan sempadan sungai harus segera dilakukan pemulihan dan di kembalikan yang mendekati kondisi alaminya akan memberikan dampak lingkungan yang sangat besar dalam perbaikan kualitas air, menjaga keseimbangan ekosistemnya, peningkatan kualitas perikanan air sungai dan menampung luapan air sungai dimusim hujan. Pemulihan sempadan sungai juga akan memberikan dampak positif bagi muara sungai. Semakin lebar bantaran sungai yang bervegetasi maka semakin efektif fungsinya dalam melindungi ekosistem sungai.

Pembahasan Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda

Sungai Karangmumus sebagai anak sungai Mahakam telah dipilih sebagai pemukiman penduduk bersama dengan tumbuhnya kota Samarinda. Lebih-lebih pada saat ini kota Samarinda selain sebagai Ibukota Samarinda Propinsi juga sebagai pusat dari salah satu pusat perniagaan yang potensial. Dengan demikian pertumbuhan pemukiman yang padat di sepanjang sungai Karangmumus terlihat mengikuti naluri atau budaya masyarakat sungai. Namun, terdapat suatu hal yang pada saat ini kurang serius diperhatikan, yaitu bahwa pemukiman padat menimbulkan beban pencemaran yang tak tertahankan bagi kawasan sungai Karangmumus yang pada kenyataannya hanya merupakan sebuah anak sungai.

Kondisi sungai yang telah parah tersebut berkaitan dengan pengaruh alam misalnya curah hujan yang tak menentu dan ulah manusia yang memperlakukan sungai tersebut sekehendak hati mereka. Sungai Karangmumus melewati tiga kecamatan di kota Samarinda, yaitu, kecamatan Samarinda Ilir, kecamatan Samarinda Ulu, dan kecamatan Samarinda Utara. Lebih kurang sepanjang 5 km ke bagian hilir, sungai ini membelah kota Samarinda yang padat penduduk sedangkan bagian tengah dan hulu sungai melewati daerah pertanian, pemukiman, pedesaan, rawa, semak belukar, hutan sekunder dan hutan bekas tebangan yang rusak (Rianto, 1992).

Bagian hilir sungai dimulai dari muara sungai yang bertemu dengan sungai Mahakam sampai ke daerah pasar segiri dengan lebar antara 25 sampai 30 meter. Keadaan ini berubah setelah dibangunnya lebar sungai yang bebas tinggal 10 meter. Bahkan bagian antara jembatan baru dan pasar segiri terdapat tempat-

tempat yang lebarnya hanya tinggal 5 meter, sehingga perahu motor yang agak besar hanya dapat melewati sungai sampai pasar segiri selebihnya ditempuh dengan perahu motor kecil. Hal ini menunjukkan bahwa daerah sepanjang sungai Karangmumus merupakan daerah yang diminati untuk dijadikan daerah pemukiman, terbukti dengan meningkatnya jumlah penduduk di daerah tersebut.

Bagi warga kota Samarinda, sungai Karangmumus mempunyai fungsi yang sangat besar. Oleh penduduk di kawasan bantaran sungai Karangmumus dimanfaatkan untuk keperluan lalu lintas, mandi mencuci bahkan untuk keperluan air minum. Di beberapa tempat lain air sungai Karangmumus digunakan untuk irigasi. Tingginya tingkat pencemaran sungai Karangmumus ini diperkuat oleh warna air sungai Karangmumus yang kehitam-hitaman dan sampah yang semakin menumpuk. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja dan memerlukan penanganan khusus dan serius dari pemerintah kota Samarinda.

Kesimpulan

1. Sarana dan prasarana yang disediakan dalam program relokasi pemukiman bantaran Sungai Karangmumus dapat dilihat dari hasil penelitian sarana dan prasarana yang ada kurang lengkap. Sehingga masyarakat yang pindah tidak kerasan tinggal di lokasi baru. Sehingga pada proses pelaksanaan masih perlu di tingkatkan lagi agar masyarakat yang pindah benar-benar merasakan secara maksimal sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah.
2. Ganti rugi untuk program relokasi pemukiman bantaran Sungai Karangmumus, pembayaran dan pembagian uang ganti rugi telah dibayarkan oleh pemerintah sehingga warga masyarakat yang terkena dampak relokasi merasa bahwa tanahnya dihargai dan pemiliknya dihormati, sehingga warga yang terkena dampak relokasi tidak dirugikan justru lahan yang baru sekarang bernilai amat tinggi yaitu 200 juta per rumah.
3. Kesadaran masyarakat untuk pindah dari pemukiman bantaran Sungai Karangmumus, kesadaran masyarakat untuk dapat pindah kelokasi yang baru direspons oleh masyarakat, dimana masyarakat banyak yang pindah ke Bengkuring dan Sambutan. Pemerintah juga memberikan proses yang mudah bagi pemindahannya sehingga masyarakat sadar akan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.
4. Peran dan fungsi pendamping dari pemerintah kota Samarinda dalam program relokasi pemukiman bantaran Sungai Karangmumus, peran dan fungsi pemerintah dalam pendampingan masyarakat yang pindah dapat dikatakan bekerja dengan baik dimana pemerintah kota Samarinda bertanggung jawab penuh dalam kegiatan relokasi ini sehingga semua warga yang pindah merasa aman dan mantap untuk dapat pindah ke lahan baru.

Saran

1. Dari hasil penelitian mengenai sarana dan prasarana yang ada ditempat relokasi, yang sudah disediakan oleh pemerintah pada dasarnya sudah baik, tetapi pada proses pelaksanaannya masih perlu peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada, pemerintah juga harus melengkapi fasilitas umum yang da seperti listrik, PDAM, telepon dan infrastruktur yang lainnya, sehingga masyarakat yang direlokasi dapat menikmati sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
2. Masyarakat harus memberikan dukungan yang besar dalam hal ganti rugi, dengan cepat melapor kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat cepat mencairkan dana relokasi kepada penduduk. Agar masyarakat cepat mendapatkan ganti rugi untuk pindah dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk masyarakat yang dapat ganti rugi rumah juga jangan menyewakan ataupun menjualnya kepada orang lain, sehingga program yang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.
3. Dalam hal kesadaran masyarakat untuk dapat pindah ketempat yang baru, dibutuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi dimana masyarakat harus benar-benar mau untuk pindah ke lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Karena ini yang sangat diperlukan oleh pemerintah dalam hal relokasi penduduk. Tidak ada masyarakat maka program ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
4. Peran dan fungsi dari Pemerintah Kota Samarinda dalam program relokasi pemukiman sungai karang mumus sangat diharapkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana kerja pemerintah untuk membantu relokasi masyarakat ketempat yang baru. Dalam hal ini juga pemerintah harus ada studi lanjut terhadap fungsi dan peran pemerintah sehingga program ini dapat cepat terlaksana dengan baik, sehingga dalam program ini tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab antar instansi yang satu dengan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif, Pembangunan*, Yogyakarta, 2005.
- Anonim, 1991, *Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan hidup Nomor63/Men-KLH/II/1991 Tentang Baku Mutu Limbah Cair*. KLH Jakarta.
- _____, 1994, *Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur*, BAPPEDA Tingkat I Kalimantan Timur.
- _____, 2003. *Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 30 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kujalitas Air Karangmumus Kota Samarinda*.
- Budiharjo, Eko, 1992, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Cetakan II, Bandung.
- Dunn, Wiliam N, 1998, *Analisis Kebijakan Publik*, PT. Hanindita, Graha Widya, Yogyakarta.
- _____, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

-
- Frederickson, H. George; dan Kevin B. Smith; 2003. *The Publik Administration Theory Primer*. USA: Westview Press.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1995. *Perilaku Organisasi*. Terjemahan Nunuk Adiarni. Jakarta: Bina Aksara.
- Gomes, Fustiono Cardosa, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Grindle, Merilee S., 1997. *Getting Good Government*. Harvard: Harvard University Press.
- Guntar Riady, 2000, *Persepsi Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Karangmumus Kotamadya Samarinda*.
- Hasibuan, 1991, *Manajemen sumber daya manusia*, CV.Haji Masagung, Jakarta.
- Henry W. Reichen dalam Budi Wiyoto, 2005, Penerbit Partner Consulting, Surabaya
- Ina, E, Salamet, *Pokok-pokok Pengertian Pembangunan Masyarakat Desa*, Bharatara, Jakarta, 1999.
- Islamy, M. Irfan, 2002. "Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara". *Dalam Jurnal Administrasi Negara, Vol.2 No.1, 2002*. Jurusan Administrasi Negara. Malang: FIA-Universitas Brawijaya.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran Dan Praktek di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1996.
- Kartono, Kartini & Gulo, Dali, 1987. *Kamus Psikologi*, Bandung : Pionir Jaya.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- Manullang (1996) , *Dasar-dasar manajemen*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta :
- Meleong, I, J, 1998, *Meleong Penelitian Kualitatif*, Cetakan 6, PT. Remaja Rosda Karya.
- _____, Lexy J., 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roesdakarya.
- Miles, Mattehew B., dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad Saleh, 1994, *Analisis Sosial Ekonomi dan Kesehatan Lingkungan mukiman Masyarakat Pada Tepi Sungai Karangmumus di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, 1994*.
- Mursidi, 2002, *Beban Masukan Bahan Organik Dan Kemampuan Swapurifikasi Sungai Karangmumus di Samarinda 2002*.
- Mustopadidjaja, AR., 2002. "Kompetensi Aparatur dalam Memikul Tanggung Jawab Otonomi Daerah dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Dalam Jurnal Good Governance LAN-RI Jakarta, Vol.1 No.1 April 2002*, h. 10-34.
- Ndara, Taliziduhu, *Metodologi Pembangunan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Rasyid, M. Ryas, 1998. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Rossi, Budi Wiyoto, 2005, Penerbit Partner Consulting, Surabaya.
- Siagian, Sondang P., 1982, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Admnistarsi*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

- _____, 2003, “*Administrasi Pembangunan Konsep – Dimensi dan Strateginya*”, Cetakan – 3, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sigit, Hardwinarto, 2002, *Identifikasi Permasalahan Sungai-sungai di Kota Samarinda, 2002*.
- Suhandang Kustadi, 1973, *Publik Relations Perusahaan*, P. Karya Nusantara, Cabang Bandung.
- Suparman Dan Sudijono, *Pembinaan Evaluasi Masyarakat*, CV. Transito, Bandung, 1986.
- Taufik M, 1996, *Evaluasi Lokal Pemukiman Warga Karangmumus di Desa dan Bengkuring Kotamadya Samarinda*.
- Thoha, Miftah, 1991. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Wahab, Abdul Solichin, 1999, “*Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*”, Edisi 2, PT. Dinar Wijaya – Malang: Brawijaya University Press.